

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai analisis Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, yang dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Riant Nugroho (2003, hal. 158) dan Faktor Pendukung dan faktor Penghambat Implementasi Kebijakan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1978), dapat disimpulkan bahwa :

Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya capaian aktivasi IKD dibandingkan target yang telah ditetapkan, serta masih adanya masyarakat yang belum melakukan aktivasi karena keterbatasan pemahaman mengenai manfaat IKD dan rendahnya pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Meskipun demikian, Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan, seperti melaksanakan sosialisasi, memberikan pelayanan aktivasi IKD di kantor, serta menyelenggarakan pelayanan jemput bola di berbagai wilayah. Temuan tersebut sejalan dengan konsep implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho yang menyatakan bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan kebijakan agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya tujuan kebijakan IKD di Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya tercapai sehingga masih diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivasi dan penggunaan IKD.

Implementasi kebijakan IKD dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas, komitmen pelaksana dalam memberikan pelayanan, ketersediaan sumber daya yang memadai, komunikasi dan koordinasi yang baik antarorganisasi pelaksana, serta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi maupun pelayanan jemput bola. Sementara itu, faktor penghambat implementasi kebijakan meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kepemilikan perangkat yang mendukung aplikasi IKD, kondisi geografis yang menyebabkan akses internet di beberapa wilayah belum optimal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi, serta masih adanya keraguan terhadap keamanan data pribadi dalam penggunaan IKD. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kesiapan organisasi pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat dan dukungan infrastruktur teknologi dalam mengadopsi layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo, ditemukan beberapa faktor penghambat yang masih memerlukan perhatian dalam rangka meningkatkan angka capaian IKD. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan IKD, sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo bersama pemerintah kapanewon dan pemerintah kalurahan perlu melakukan penyesuaian sasaran sosialisasi berdasarkan karakteristik masyarakat serta membentuk Klinik Aktivasi IKD di tingkat kalurahan/desa. Sosialisasi dapat disesuaikan dengan kelompok

masyarakat, seperti pelajar, ASN, pelaku usaha, lansia, dan masyarakat umum agar informasi yang diberikan lebih tepat sasaran. Keberhasilan program ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dan jumlah aktivasi IKD di setiap wilayah. Saran ini menjadi prioritas utama karena rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala terbesar dalam implementasi IKD.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), perguruan tinggi, serta komunitas digital perlu membentuk Relawan Digital IKD dan memperkuat kampanye mengenai keamanan data pribadi. Keberhasilan program ini ditandai dengan meningkatnya literasi digital masyarakat, berkurangnya keraguan terhadap keamanan data, serta meningkatnya jumlah aktivasi IKD. Saran ini perlu menjadi perhatian karena peningkatan pemahaman dan kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendorong penggunaan IKD.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo perlu memperkuat kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), operator seluler, pemerintah kapanewon, dan pemerintah kalurahan untuk meningkatkan kualitas jaringan internet serta melakukan monitoring capaian aktivasi IKD di setiap kapanewon secara berkala. Keberhasilan program ini ditandai dengan meningkatnya kualitas jaringan, tersedianya data capaian aktivasi per kapanewon, dan meningkatnya pemerataan aktivasi IKD. Saran ini penting sebagai upaya evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaan kebijakan IKD dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo.